

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TURKI

SEBELUM TAHUN 2014

Dalam bab dua ini akan membahas mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Turki sebelum tahun 2014. Dimulai dari sejarah hubungan Indonesia dengan Turki, serta hubungan Indonesia dengan Turki pada masa Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

A. Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam menjalankan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional, politik luar negeri Indonesia diatur dalam beberapa landasan, yaitu landasan konstitusional, idiil, dan operasional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Alami, 2008). UUD 1945 berisi tentang prinsi-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang mengatur tentang aturan-aturan dasar dalam melakukan politik luar negeri Indonesia terhadap negara lain. Pada pembukaan UUD 1945, berisikan tentang tujuan serta kepentingan Indonesia dalam dunia internasional, seperti pada alenia pertama yang bertuliskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Serta pada alenia keempat yang berisikan mengenai ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari dua alenia tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan serta kepentingan politik luar negeri Indonesia adalah untuk aktif dalam menjaga perdamaian Internasional serta menolak segala bentuk penjajahan di dunia.

Kemudian, landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila (Alami, 2008). Hatta pernah menyatakan bahwa Pancasila merupakan faktor objektif politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan, di dalam Pancasila terdapat lima sila yang digunakan sebagai dasar falsafah dalam hidup bernegara, falsafah ini mengikat setiap tindakan elemen bangsa Indonesia supaya tidak adanya penyimpangan dalam aktifitas politik luar negeri oleh suatu golongan atau partai politik tertentu. Dan yang terakhir adalah landasan operasional, landasan operasional ini mengacu pada pemimpin negara dalam hal ini yaitu Presiden. Setiap pemimpin negara yang berganti tentu memiliki visi dan misi yang berbeda serta pola dalam menjalankan politik luar negerinya. Setiap kebijakan politik luar negeri di buat dan dijalankan oleh presiden serta dapat berubah sesuai dengan visi – misi Presiden selama kampanye dan kondisi yang dialami selama memimpin. Meskipun kebijakan politik luar negeri dapat dirubah oleh presiden, akan tetapi seorang presiden memiliki keterbatasan dalam menetapkan sebuah kebijakan politik luar negeri yaitu tetap mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam politik luar negeri Indonesia yang di jalankan oleh Presiden dari waktu ke waktu, penulis akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri.

Peta 2.1 Indonesia



Peta 2.2 Turki



B. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia – Turki



Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki merupakan hubungan yang terjalin secara politik antar negara. Hubungan diplomatik

antara Indonesia dengan Turki secara umum terjalin karena sama-sama memiliki kepentingan, karena kedua negara ini memiliki jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah muslim dan sama-sama negara yang demokrasi. Negara Indonesia dan Turki berperan penting sebagai contoh dimana Islam dan demokrasi dapat hidup bersama dan maju. Hubungan bilateral yang telah terjalin sejak tahun 1950 dimana Indonesia memiliki duta besar di Ankara dan Turki memiliki duta besar di Jakarta dan konsulat kehormatan di Medan sejak Mei 1996. Indonesia dan Turki sama-sama tergabung dalam organisasi seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*, dan *The Group of Twenty (G-20)*

Hubungan Indonesia dengan Turki sudah terjalin sangat baik sejak lama. Dalam catatan sejarah selama ini, hubungan Indonesia dengan Turki nyaris tidak ada catatan yang buruk. Hubungan diplomatik yang terjalin menjangkau ke dalam berbagai sektor bidang, seperti kerjasama politik, ekonomi, pariwisata, sosial dan pendidikan, hingga militer. Faktor sama-sama negara dengan mayoritas beragama Islam menjadikan hubungan Indonesia dan Turki erat dan memiliki hubungan emosional baik negara maupun sesama penduduknya.

Hal itu yang kemudian menjadikan motivasi antar negara untuk sama-sama meningkatkan kerjasama ke dalam berbagai bidang baik secara umum maupun strategis. Untuk itu berbagai dinamika hubungan bilateral pun terjadi selama menjalin hubungan.

Sejarah telah mencatat bahwa asal mula hubungan Indonesia dengan Turki terjalin sejak abad ke – 12. Dimulai ketika para pelajar Turki yang mengunjungi Indonesia dengan membawa misi untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia. Pelajar Turki membawa dan menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah di wilayah Indonesia yang dimulai dari wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey). Disisi lain, catatan sejarah juga membuktikan bahwa hubungan kedua negara ini sudah ada sejak abad ke – 16.

Turki pada saat itu berada pada kepemimpinan Utsmaniyah yang melakukan ekspedisi ke Aceh pada tahun 1565 ketika kesultanan Ustmaniyah memberikan dukungan ke kesultanan Aceh dalam melakukan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Penyebab Utsmaniyah melakukan ekspedisi ke Aceh adalah karena kesultanan Aceh meminta bantuan kepada Ustmaniyah yang kemudian direspon baik oleh Utsmaniyah dengan memberikan bantuan dalam mengalahkan pasukan Portugis yang menduduki wilayah Malaka. Aceh yang merupakan salah satu provinsi Republik Indonesia sekarang ini, dahulunya merupakan bagian dari Imperium Ustmani di wilayah Asia Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemiripan lambang dalam bendera yang dimiliki oleh Kesultanan Ustmaniyah dan Kesultanan Nanggroe Aceh Darussalam (Black, 1996). Ekspedisi tersebut kemudian menyebabkan terjalinnya hubungan kerjasama baik antara kesultanan Aceh dan kesultanan Ustmani dalam berbagai bidang, seperti militer, perdagangan, budaya, dan keagamaan.

Hubungan yang baik sudah terjalin sejak lama hingga mengarah kepada yang lebih serius. Hubungan terjalin ketika Indonesia dan Turki sama-sama menjadi negara dengan demokrasi yang tinggi. Penerapan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mendorong untuk dilakukannya kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan Turki. Komitmen dalam menjalin hubungan bilateral dengan menjunjung nilai demokrasi yang baik menjadi dasar terjalinnya hubungan Indonesia – Turki. Meskipun dalam sejarahnya Turki pernah menganut sistem otoriter yang kemudian berubah menjadi demokrasi, tidak merubah keinginan kedua negara ini menjalin hubungan bilateral yang baik. Hal ini dikarenakan sudah terjalinnya hubungan baik sejak dahulu.

Kemudian dalam pengakuan kedaulatan antar negara yang lebih formal dan instens sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam dunia internasional. Negara Republik Indonesia mengakui kedaulatan Republik Turki sejak kemerdekaanya pada bulan oktober tahun 1923. Kemudian negara Turki mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia sejak tanggal 29 Desember 1949, setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 10 april 1957 dibukannya kedutaan besar Turki yang berada di Jakarta (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey).

Setelah terjadinya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki, yang kemudian ditindak lanjuti untuk mengarah kepada terjalinnya hubungan kersama kedalam berbagai sektor. Saling kunjung antar kepala negara juga membuktikan bahwa terjadinya hubungan yang serius antar kedua negara ini, meskipun telah terjadi pergantian kepala negara di kedua negara

tidak menyurutkan niat untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Baru-baru ini pada tanggal 5 juli 2017, jokowi bertolak menuju ke Turki dalam rangka untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Turki sekaligus untuk membalas kunjungan yang telah dilakukan oleh Presiden Turki Erdogan pada tahun 2015 (Ihsanuddin, 2017)

Peta 2.3 Indonesia – Turki



Seperti yang dapat dilihat pada peta, Turki merupakan sebuah negara yang masuk kedalam kawasan Timur Tengah, dimana posisinya sangat strategis sebagai penghubung antara Dunia Arab dan Eropa. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang identik dengan Dunia Arab, akan tetapi dalam kenyataanya banyak juga kelompok non Arab yang berada di wilayah Timur Tengah, salah satunya adalah Turki (Jatmika, 2014). Untuk itu, kawasan Timur Tengah khususnya Turki menjadi penting bagi Indonesia dikarenakan sejumlah hal, yaitu merupakan tempat turunya agama-agam samawi, kaya akan minyak, membutuhkan tenaga kerja non-formal dari Indonesia, serta menjadi tempat bagi Indonesia untuk menyebarkan perdamaian dan bertukar pengalaman.

C. Masa Presiden Soekarno

Pada era Presiden Soekarno biasa disebut dengan era Orde Lama, dimana landasan operasional politik luar negeri Indonesia dinyatakan dalam maklumat dan beberapa pidato Presiden Soekarno yang menjelaskan tentang kebijakan hidup bertetangga dengan negara lain di kawasan, dengan tidak ikut campur masalah domestik negara lain, dan selalu berada pada koridor Piagam PBB (Alami, 2008). Berbagai kebijakan politik luar negeri yang berhasil dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno seperti Konferensi Meja Bundar (KMB), Konferensi Asia-Afrika, Konfrontasi Irian Barat dan Malaysia, hingga pembentukan poros Jakarta – Peking – Hanoi – Phon Penh – Pyong Yang (Wuryandari, 2008). Pembuatan kebijakan politik luar negeri era Soekarno juga tidak lepas dari kondisi perang dunia ke-2 yang sedang berlangsung, kondisi politik internasional yang sedang berlangsung juga sangat mempengaruhi dan bagaimana para pemimpin Indonesia harus menyikapinya.

Pada era Presiden Soekarno, Indonesia baru saja memerdekakan dirinya setelah Jepang menyerah kepada sekutu hingga terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Setelah itu Soekarno serta Hatta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru saja merdeka Presiden Soekarno dan Hatta dihadapkan berbagai macam masalah, seperti pembentukan kabinet, mempertahankan kemerdekaan, melawan kekuatan asing yang ingin menjajah kembali. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia yang pertama dan di pimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo sebagai

Menteri Luar Negeri. Tuga pertama Kemenlu pada saat itu adalah mencari dukungan sebanyak-banyaknya agar Indonesia dapat diakui oleh negara lain atas wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Seperti yang diketahui dalam penjelasa sejarahnya, hubungan politik luar negeri Indonesia terhadap Turki di era Soekarno dimulai ketika Negara Republik Indonesia mengakui kedaulatan Republik Turki sejak kemerdekaanya pada bulan oktober tahun 1923. Kemudian negara Turki membalas mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia sejak tanggal 29 Desember 1949, setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Pengakuan saling mengakui kemerdekaan negara masing-masing kemudian berlanjut dimulainya hubungan politik antar kedua negara, dimana Pada tanggal 10 april 1957 dibukannya kedutaan besar Turki yang berada di Jakarta.

Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa, Presiden Soekarno sangat tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Turki, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Presiden Soekarno juga dalam beberapa kesempatan sempat membahas mengenai perkembangan politik yang ada di Turki. Bahkan terdapat kutipan Presiden Soekarno yang membahas mengenai situasi politik yang ada di Turki. (Robby, 2016) Adapun kutipan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, adalah :

“Sebab, sebenarnya, orang yang tidak datang menyelidiki sendiri keadaan di Turki itu, atau tidak membuat studi sendiri yang luas dan dalam dari kitab-kitab yang mengenal Turki itu, tidak mempunyai hak untuk membicarakan soal Turki itu di muka umum. Dan lebih dari itu, ia tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis atas negeri Turki itu di muka umum”

Kemudian pada tanggal 24 April 1959, Presiden Soekarno mendapat kesempatan untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama Presiden RI ke Ankara dan mengamati secara keseluruhan situasi yang ada di dalam Turki itu sendiri. Foto yang ada di bawah ini menunjukkan bahwa Presiden Soekarno yang sangat senang berada di Turki dan di sambut dengan baik oleh seluruh rakyat Turki. Presiden Soekarno di sambut baik oleh Presiden Turki ke-3 Celal Bayar, salah satu politisi Turki yang di ketahui dekat dengan Mustafa Kemal Ataturk.

Gambar 2.1 Kunjungan Presiden Soekarno ke Turki.



Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Soekarno memiliki sejumlah agenda penting dengan Turki, diantaranya membahas mengenai potensi kerjasama yang akan terjalin antara Indonesia dengan Turki, mengingat Indonesia dan Turki memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim, serta meminta dukungan Turki supaya Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan kedaulatan Indonesia baik dari negara lain maupun organisasi internasional.

Selama berada di Turki, Presiden Soekarno berkesempatan untuk mengunjungi makam Atatürk di Anıtkabir. Di Anıtkabir ini pula Presiden Soekarno juga berkesempatan untuk berpidato di hadapan seluruh warga Turki, dan menyampaikan bahwa Atatürk telah menjadi bagian dari inspirasi Presiden Soekarno dalam merumuskan gagasan mengenai hubungan antara agama dan negara. (Hanato, 2016)

Selanjutnya, Presiden Soekarno juga diketahui melakukan kunjungan ke Turki pada tanggal 16 April 1959. Dalam kunjungannya tersebut tidak terdapat perbedaan seperti kunjungan sebelumnya, yaitu mengunjungi kota Istanbul serta tempat-tempat bersejarah lainnya. Kunjungan tersebut kemudian berakhir pada tanggal 19 April 1956, yang selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke Polandia. Setelah kunjungan tersebut, belum terdapat literatur banyak mengenai hubungan Indonesia dengan Turki di era Presiden Soekarno.

Namun demikian, dapat kita tarik kesimpulan mengenai politik luar negeri Indonesia dengan Turki di era Soekarno. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa, Turki merupakan salah satu negara yang dekat dengan Indonesia. Hal tersebut diketahui dengan adanya saling diakuinya kemerdekaan negara masing-masing, serta dibukannya kedutaan besar Turki di Indonesia dan sebaliknya dibukannya kedutaan besar Indonesia di Turki. Selain itu, adanya ketertarikan Presiden Soekarno mengenai situasi politik yang ada di Turki dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi inspirasi pemikiran Soekarno. Kunjungan Presiden Soekarno juga merupakan peristiwa sejarah penting bagi kedua negara, karena merupakan awal kunjungan pertama

pemimpin negara Indonesia ke Turki dan kemudian berlanjut sampai sekarang.

Situasi politik pada saat masa kepemimpinan Soekarno adalah masa-masa dimana situasi dunia sedang mengalami Perang Dingin. Untuk itu, diperlukannya pondasi yang kuat bagi kedua negara dalam menjalankan hubungan bilateral. Pada saat Perang Dingin yang sedang memanas, Turki merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari Blok Barat, dan Presiden Soekarno yang merupakan bagian Non-Blok tetap mencoba untuk menjalin hubungan yang baik dengan Turki. Salah satu alasan dilakukannya hubungan dengan Turki adalah sebuah negara demokratis, modern, dan memiliki penduduk yang mayoritasnya Muslim.

D. Masa Presiden Soeharto

Gambar 2.2 Pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Turki Kenan Evren di Jakarta



Pada masa Presiden Soeharto disebut juga dengan era Orde Baru yang menggantikan Orde Lama. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia

mengalami perkembangan dengan adanya peraturan – peraturan baru. Peraturan-peraturan tersebut antara lain, yaitu Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973, dan keputusan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri (Suryadiata, 1998). Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan politik luar negeri sangat berbeda sekali dengan politik luar negeri pada masa Soekarno. Dimana pada masa Soekarno lebih cenderung menentang dan menjauhi dunia barat dan lebih dekat dengan negara – negara berideologi komunis, sedangkan pada masa Soeharto lebih cenderung dekat dengan dunia barat.

Pada era Soeharto lebih memfokuskan kebijakan politik luar negeri untuk memperbaiki citra Indonesia di kancan Internasional dan mengarahkan kepada pembangunan ekonomi di dalam negeri, hal ini di sebabkan pada masa kepemimpinan Soekarno lebih banyak mengeluarkan konfrontasi – konfrontasi yang membuat citra Indonesia menjadi buruk ditambah dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Untuk itu fokus utama politik luar negeri Soeharto adalah dengan memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia yang sempat memburuk di era Soekarno dan mengupayakan agar Indonesia dapat kembali menjadi anggota PBB (Wuryandari, 2008). Era Soeharto juga masih menggunakan politik bebas aktifnya, dengan tafsiran bahwa menjalin hubungan baik dengan banyak negara serta upaya terjalinnya kerjasama ekonomi dan investasi.

Hubungan politik luar negeri Indonesia dengan Turki di Era Soeharto mengalami kemajuan yang baik. Hal ini dapat kita ketahui dari sejumlah kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Indonesia dengan Turki.

Baik itu di bidang kebudayaan, ekonomi, teknik maupun teknologi. Hal ini tidak lepas dari politik luar negeri Presiden Soeharto yang mengarahkannya kepada hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Berikut ini adalah daftar perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Turki di era kepemimpinan Presiden Soeharto.¹

1. Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, di tandatangi pada tanggal 18 Agustus 1973 di Jakarta.
2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, di tandatangi pada tanggal 18 Desember 1982 di Jakarta.
3. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Pariwisata, di tandatangi pada tanggal 6 Oktober 1993 di Jakarta.
4. Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Pertanian, di tandatangi pada tanggal 30 Mei 1995 di Jakarta.
5. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, di tandatangi pada tanggal 25 Februari 1997 di Jakarta.

¹ <http://treaty.kemlu.go.id>

Apabila melihat perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan Turki pada masa Presiden Soeharto, dapat diketahui bahwa telah banyak perjanjian kerjasama yang dibuat antara Indonesia dengan Turki dengan berbagai bidang, seperti kerjasama kebudayaan, ekonomi, pariwisata, pertanian, hingga pembebasan pajak antara kedua negara. Pada masa Presiden Soeharto inilah yang kemudian menandai adanya kesepakatan kerjasama ekonomi untuk pertama kalinya bagi kedua negara, serta kesepakatan kerjasama ekonomi tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum untuk menjalin kerjasama yang lebih baik ke berbagai bidang sampai sekarang ini.

Adapun sejumlah literatur menyebutkan bahwa Presiden Turki yakni Kenan Evren, melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada tanggal 17 Desember 1982. Kunjungan Presiden Turki tersebut merupakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, dimana kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama kalinya Presiden Turki di Indonesia. Presiden Turki Kenan Evren yang datang dengan istrinya Senay Gurvit ke Indonesia di sambut baik oleh Presiden Soeharto dan Ibu Soeharto di Istana Merdeka. Kunjungan Presiden Turki tersebut dalam rangka untuk menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, khususnya mengenai kerjasama ekonomi kedua negara. (Dwipayana & Sjamsuddin, 2003)

E. Masa Presiden B. J. Habibie dan Masa Transisi

Tahun 1998, pada saat Presiden Habibie menjabat menggantikan Presiden Soeharto yang lengser dari kekuasaannya membuat posisi Habibie menjadi lemah. Munculnya rasa ketidakpercayaan parlemen terhadap pemerintahan Soeharto membuat Presiden Habibie mendapat perlawanan yang

sengit serta kondisi dalam negeri yang kacau akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Juwono & Sahrasad, 2001). Namun Presiden Habibie dapat mengatasinya dengan baik dan mempertahankan kekuasaannya. Meskipun kekuasaan Presiden Habibie terbilang cukup singkat, akan tetapi mampu membuat beberapa gebrakan dalam hal kebijakan politik luar negeri.

Prioritas utama pada masa kepemimpinan Habibie adalah memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis moneter. Meskipun krisis Indonesia disebabkan oleh lembaga keuangan seperti IMF, akan tetapi Habibie masih tetap mengandalkan IMF dan Bank Dunia dalam memperbaiki krisis moneter yang melanda Indonesia. Berbagai program – program pembangunan untuk negara berkembang seperti Millenium Development Goals (MDGs) menjadi andalan pemerintah untuk keluar dari krisis. Namun, dalam perjalanannya MDGs tidak berjalan dengan baik. hal ini menyebabkan politik luar negeri yang awalnya bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan rakyat secara nasional, justru menjadi kepentingan korporasi internasional untuk memasukkan kepentingannya di Indonesia (Rais, 2008).

Politik luar negeri Indonesia terhadap Turki di era Presiden Habibie tidak terjadi perubahan apapun. Hal ini di karenakan, Presiden Habibie merupakan Presiden yang diangkat setelah lengsernya Presiden Soeharto dan masa kepemimpinannya begitu sangat singkat hingga diadakannya pemilihan pergantian Presiden yang baru. Selain itu, pada saat Presiden Habibie menjabat, terdapat situasi politik dan ekonomi di Indonesia yang sangat kacau hingga membuat Presiden Habibie memfokuskan terhadap kestabilan kondisi di dalam negeri.

Situasi dalam negeri yang kacau akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tidak memungkinkannya Presiden Habibie dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya terhadap negara lain, khususnya negara Turki. Untuk itu, arah politik luar negeri Indonesia terhadap negara Turki pada masa Presiden Habibie masih sama ketika berada pada masa Presiden Soeharto. Hubungan bilateral tersebut tetap berjalan meskipun Indonesia mengalami kondisi politik yang tidak stabil akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998.

Namun, dalam waktu kepemimpinan yang singkat tersebut, Presiden Habibie mampu memperoleh prestasi dalam politik luar negeri. Di era Habibie, kepentingan nasional dalam berdiplomasi ditujukan dalam upaya pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis moneter. Diplomasi juga digunakan oleh Habibie untuk memperoleh perhatian dunia internasional dan mendapatkan dukungan internasional untuk mengukuhkan legitimasinya sebagai presiden transisional supaya diakui.

F. Masa Presiden Abdurrahman Wahid

Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil melantik Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden dan kemudian Megawati Soekarno Putri menjadi Wakil Presiden. Hal inilah dinilai oleh sejumlah kalangan dimana Indonesia mulai memasuki era Reformasi dan berakhirnya Era Orde Baru yang otoriter (Haris, 2014).

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke arah era orde lama yang

dijalankan oleh Presiden Soekarno, dimana tidak adanya kejelasan arah mengenai fokus politik luar negeri yang hanya mementingkan peningkatan citra dalam dunia internasional. Hubungan Republik Indonesia dengan dunia barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor – Timur. Salah satunya yang paling menonjol adalah buruknya hubungan Indonesia dengan Australia (Rais, 2008).

Di era kepemimpinan Gusdur, diplomasi Indonesia untuk kepentingan nasional lebih kearah untuk mendapatkan dukungan internasional untuk membantu memperbaiki ekonomi. Selain itu juga berbagai rangkaian kunjungan kegiatan ke berbagai negara telah dilakukan oleh Gusdur untuk mendapatkan dukungan untuk mengatasi masalah konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial wilayah Indonesia, serta mengembalikan fungsi demokratisasi kepada militer untuk lebih professional. Ancaman integrasi nasional menjadi fokus utama kepemimpinan Presiden Gusdur dalam menjalankan politik luar negerinya.

Oleh karena realitas kondisi domestik yang seperti itu menjadikan dasar dalam menjalankan politik luar negerinya. Pada awal pemerintahanya, Presiden Gusdur berusaha untuk memperkuat komitmen dunia atas wilayah integritas Indonesia dengan melakukan perjalanan lebih dari 80 negara dalam waktu duapuluh bulan pemerintahanya. Diplomasi yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai ‘diplomasi persatuan’ itu dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional atas wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang tengah mengalami masalah disintegritas (Wuryandari, 2008)

Dalam setiap kunjungan luar negeri yang intensif dalam masa pemerintahannya yang singkat, Presiden Gusdur selalu mengangkat terkait isu domestik di dalam negeri dalam setiap pertemuan. Namun hal tersebut, dinilai oleh sebagian kalangan khususnya di dalam negeri sendiri sebagai agenda yang tidak jelas dan pemborosan anggaran yang tidak produktif di tengah ekonomi yang lemah. Bahkan, Presiden Gusdur juga mengangkat isu terkait berkeinginannya dibuka diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Hal inilah menjadi puncak banyaknya kalangan yang melakukan protes terhadap Presiden Gusdur hingga akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Presiden (Rais, 2008).

Pada saat Presiden Gusdur menjabat, kebijakan mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Turki belum mengalami banyak perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena, situasi politik dalam negeri yang menjadikan kebijakan politik luar negeri Presiden Gusdur untuk melakukan kunjungan ke berbagai negara dalam rangka memastikan negara lain mengakui secara berdaulat wilayah Indonesia, hal ini tentunya berlaku terhadap kunjungannya ke Turki.

Kerjasama antara Indonesia dengan Turki pada masa Presiden Gusdur berlangsung seperti biasanya, baik dari segi bidang politik maupun ekonomi. Hubungan antara Indonesia dengan Turki tetap terjaga dengan baik tanpa adanya sebuah peristiwa yang penting terjadi antara Indonesia dengan Turki pada era Presiden Gusdur.

G. Masa Presiden Megawati Soekarno Putri

Setelah di cabutnya mandat Presiden Abdurrahman Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, berakhirlah masa kepresidenan Abdurrahman memimpin Indonesia pada tahun 2001. Kemudian, sesuai dengan Undang-undang maka Megawati yang menjabat sebagai Wakil Presiden diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 dan pertama kalinya jabatan Presiden di pegang oleh perempuan. Sedangkan posisi Wakil Presiden di isi oleh Hamzah Haz ikut mendampingi Megawati memimpin Republik Indonesia. Meskipun kepemimpinan telah berganti, hal ini tidak membuat masalah yang ada pada Indonesia terselesaikan begitu saja. Kepemimpinan Presiden Megawati dihadapkan oleh setumpuk masalah yang ada pada dalam negeri yang harus segera cepat di selesaikan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.

Dalam bidang politik luar negeri, pada tulisan sebelumnya sudah di jelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid tidak memiliki arah yang jelas mau dibawa kemana peran Indonesia dalam kancah dunia Internasional. Hal ini tentunya membuat Megawati harus mampu merumuskan kembali secara jelas mengenai politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia setelah berakhirnya masa Orde Baru di kancah dunia internasional sangat lemah, yang di sebabkan oleh krisis ekonomi, konflik dalam negeri, masalah disintegritas, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kemudian pada tahun 2001, Megawati banyak mendapat kritik di kalangan dalam negeri maupun luar negeri yang mulai mempertanyakan

tentang peran Indonesia terhadap kawasan Asia Tenggara terutama kontribusinya terhadap ASEAN yang dianggap lemah dan mengalami kemunduran, tidak seperti pada masa Orde Baru yang lebih menonjol dalam forum – forum ASEAN (Rachmianto, 2004). Untuk itu, Presiden Megawati di tuntut untuk mengembalikan posisi Indonesia di ASEAN seperti yang pada Orde Baru, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menggagas terbentuknya ASEAN. Selain itu, Indonesia di tuntut untuk lebih berkomitmen terhadap diplomasi ‘bebas aktif’ yang menjadi andalan, serta mampu meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah perpolitikan regional, kawasan, maupun internasional lebih baik lagi.

Pada masa pemerintahan Megawati, peran Kemenlu mulai terlihat aktif dimana dalam hal melakukan kunjungan luar negeri maupun kehadiran forum-forum internasional dilakukan, meskipun dalam beberapa kesempatan Presiden Megawati juga melakukan kunjungan keluar negeri akan tetapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh Kemenlu (Rachmianto, 2004). Hal ini dikarenakan seorang Presiden harus fokus terhadap urusan dalam negeri yang nantinya akan berdampak pada hubungan luar negeri.

Mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Turki di era Presiden Megawati juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dikarenakan Presiden Megawati yang dilantik menjadi Presiden, menjalankan pemerintahan di periode ketika Presiden Gusdur menjabat dan Megawati yang kala itu menjadi Wakil Presidennya. Kunjungan-kunjungan para pemimpin kedua negara juga belum pernah terjadi pada masa Presiden

Megawati. Hal ini mengakibatkan hubungan antara Indonesia dengan Turki tidak mengalami peningkatan yang baik dari era sebelumnya.

Namun hubungan yang berlangsung antara Indonesia dengan Turki tetap terjalin dengan baik, dimana kesepakatan kerjasama yang telah dilakukan tetap berjalan dengan sangat baik. Kerjasama ekonomi Indonesia-Turki juga mengalami peningkatan seiring membaiknya ekonomi nasional kedua negara setelah terjadinya krisis tahun 1998. Hubungan yang baik ini pula tidak lepas dari kebijakan politik ‘bebas aktif’ yang tetap dijaga oleh Presiden Megawati membuat hubungan bilateral Indonesia – Turki tanpa adanya catatan secara khusus.

H. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah selesai kepemimpinan Presiden Megawati, kemudian diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden secara langsung yang dipilih oleh rakyat pada tahun 2004. Dari hasil pemilu tersebut maka terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 2004 – 2009. Kemudian pada periode berikutnya, SBY terpilih kembali menjadi Presiden dari tahun 2009 – 2014. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, telah berhasil mencetak beberapa prestasi seperti kestabilan politik dalam negeri, perbaikan ekonomi, berjalannya demokrasi secara baik, serta berkurangnya separatisme di dalam negeri. Tidak hanya itu, prestasi juga berhasil di tolehkan oleh SBY dalam bidang politik luar negeri, seperti meningkatnya posisi Indonesia dalam kancah perpolitikan luar negeri.

Arah kebijakan politik luar negeri pada pemerintahan SBY – Jusuf Kalla dan SBY – Boediono tetap menggunakan ‘politik bebas aktif’, sehingga hal tersebut mendorong SBY untuk lebih proaktif dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia. Terdapat tiga fokus utama kebijakan politik luar negeri yang digaungkan oleh SBY (Djalal, 2008). **Pertama**, Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa – bangsa. Dalam hal ini, kebijakan politik luar negeri SBY adalah meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara sahabat dengan melakukan berbagai kerjasama baik ekonomi, politik, maupun keamanan, sehingga maka akan terciptanya kondisi politik yang stabil antar negara. SBY juga melakukan peningkatan peranannya Indonesia dalam komunitas internasional lainnya, seperti ASEAN. Dimana dalam setiap kesempatan forum, SBY selalu menekankan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang dapat bersahabat baik dengan negara lain, Indonesia merupakan negara yang cinta damai dan mau menjalin kerjasama dengan negara manapun. Hal tersebut yang kemudian dikenal oleh banyak kalangan sebagai motto *‘Thousand Friends, Zero Enemy’*, yaitu menjalin hubungan dengan banyak negara tanpa memiliki musuh dalam kebijakan politik luar negerinya.

Kedua, yaitu memperkokoh persatuan dan kerjasama ekonomi melalui kerjasama perdagangan maupun investasi. Dalam hal ini SBY secara sadar bahwa untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan

negara lain adalah melakukan kerjasama ekonomi. Dimana kerjasama ekonomi ini akan membuat negara saling memiliki kepentingan dengan negara lain untuk meningkatkan perekonomian sebuah negara. Banyak hal yang telah dilakukan oleh SBY dalam kerjasama ekonomi dengan negara lain, salah satunya adalah banyaknya penandatanganan perjanjian perdagangan bebas yang telah dilakukan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. *ASEAN Free Trade* merupakan salah satu kesepakatan perdagangan bebas antar sesama negara ASEAN semasa Presiden SBY.

Ketiga, yaitu meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang – undang dasar yang menyatakan bahwa Indonesia berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia, meningkatkan keadilan sosial, dan menolak segala bentuk penjajahan dimuka bumi. Dalam hal ini, terdapat peningkatan prestasi Indonesia dalam politik luar negeri yang dilakukan oleh SBY, salah satunya adalah melakukan penyelesaian perbatasan antara Indonesia dengan dengan tetangga seperti penyelesaian perbatasan antara Indonesia – Papua Nugini, Indonesia – Malaysia, Indonesia – Timor Leste. Kemudian terdapat dukungan Indonesia terhadap Palestina yang sedang berkonflik dengan negara Israel, mengirimkan pasukan TNI ke berbagai negara konflik dengan misi perdamaian, serta mulai meningkatnya fokus pemerintah terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara lain.

Pada masa pemerintahan SBY, kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Turki mengalami peningkatan yang positif. Hal ini terjadi setelah adanya beberapa kesepakatan yang telah di buat antara Indonesia dengan Turki, salah satunya menyangkut kerjasama Industri Pertahanan.

Berikut ini adalah daftar perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Turki di era kepemimpinan Presiden Soeharto.

1. Protokol Kerjasama antara Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Pusat Promosi Ekspor, Turki, ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2005 di Ankara.
2. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Republik Indonesia dan Badan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknik, Turki mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2005 di Ankara.
3. Pengaturan antara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan Direktur Jenderal PTT, Kementerian Transportasi Republik Turki mengenai Penerbitan Perangko Bersama, ditandatangani pada tanggal 18 September 2008 di Ankara.
4. Memorandum Saling Pengertian antara Jasa Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Kerja Sama Radio-Televisi Turki (TRT) mengenai Program Kerja Sama

Pertukaran, di tandatangi pada tanggal 18 September 2008 di Ankara.

5. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Industri Republik Indonesia dan Kementerian Industri dan Perdagangan Republik Turki mengenai Kerjasama antar Industri Usaha Kecil dan Menengah, ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara.
6. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan Promosi dan Dukungan Penanaman Modal Republik Turki mengenai Kerjasama Promosi Penanaman Modal, ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara.
7. Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki, ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara.
8. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan kementerian Luar Negeri Republik Turki, ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 di Jakarta.
9. Persetujuan antara Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 di Jakarta.
10. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri

Republik Turki mengenai Konsultasi Bilateral, ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 di Jakarta.

11. Deklarasi Intent antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial Republik Turki mengenai Kerjasama Kesejahteraan Sosial, ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2013 di Ankara.

Jika dilihat daftar perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Presiden SBY telah mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan tersebut telah merambah kesejumlah bidang kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Turki. Hal ini tentunya menjadi pertanda baik terhadap kedua negara untuk terus menjalankan hubungan bilateral ke banyak bidang.

Gambar 2.3

Presiden SBY dengan Presiden Abdullah Gul di Istana Merdeka



Gambar 2.4

Presiden SBY dengan Presiden Turki Erdogan di Bali

